



BAB IV

INTERPRETASI DATA

Pada bab ini akan disajikan interpretasi data sebagai kelanjutan dari bab sebelumnya. Interpretasi data merupakan proses mendiskusikan antara temuan data dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Tujuan dilakukan interpretasi data adalah untuk melakukan inferensi logika yaitu menarik kesimpulan hasil analisis pada level empiris ke level konseptual atau teoritik.

IV.1 Interpretasi Data

Pada bagian ini akan dilakukan interpretasi terhadap data-data yang berhasil dikumpulkan. Interpretasi ini bertujuan untuk mencari makna dan implikasi yang lebih luas dari data-data yang ditemukan di lapangan.

Dengan munculnya reformasi, maka pelaksanaan otonomi daerah pun secara otomatis juga dimulai. Terkait dengan aspek otonomi daerah, isu yang mencuat adalah adanya tuntutan yang luas dan nyata yang harus diberikan kepada daerah. Tuntutan itu juga berwujud pada keinginan daerah akan adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara lebih rasional dan proporsional. Lebih lanjut, keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting yang harus diatur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini juga ditegaskan oleh Mardiasmo yang menyatakan bahwa salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah keuangan daerah dan anggaran



daerah. Keuangan dan anggaran daerah merupakan alat fiskal pemerintah daerah, yang merupakan bagian integral dari keuangan negara.¹

Perkembangan *Good Governance* menjadi tema yang sentral sebagai reaksi terhadap tata pemerintahan yang tidak berlandaskan pada nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi. Untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugas secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Perlu diletakkan asas-asas umum penyelenggaraan negara. Asas-asas umum penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang No.28 Tahun 1999, meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Konsep akuntabilitas publik didasari pemikiran bahwa rakyat tidak hanya berhak mengetahui pada pelaporan pertanggungjawaban keuangan saja, tetapi juga non-keuangan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan akuntabilitas kinerja. Dalam kaitan ini, setiap pimpinan instansi/satuan kerja pemerintah wajib melaporkan hasil kerjanya kepada atasannya yang memberi tugas dan wewenang (amanah), dan kepada publik sesuai dengan peraturan dan perundangannya yang berlaku (Inpres No.7/1999).

Beberapa kelemahan yang dapat dilihat dari tidak adanya penerapan akuntabilitas adalah adanya kelemahan dalam sistem pengelolaan keuangan negara dan juga kelemahan dalam pelaporan pertanggungjawaban kinerja. Kelemahan dalam sistem pengelolaan keuangan negara selama ini terjadi dibidang peraturan perundang-undangan, perencanaan dan penganggaran, perbendaharaan

¹ Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit CV. Andi. Yogyakarta, hal. 11



dan akuntansi, auditing, dan pelaporan pertanggung jawabannya. Sedangkan beberapa kelemahan dalam pelaporan pertanggungjawaban kinerja yaitu belum menerapkan sistem pengukuran kerjanya dengan baik, sehingga tidak dapat diketahui capaian kinerja yang telah dihasilkannya. Hal ini mengakibatkan instansi pemerintah tidak tahu posisi dan arah yang tepat, tidak dapat belajar dari keberhasilan ataupun mengoreksi kegagalan masa lalu, tidak mampu memberikan penghargaan ataupun untuk hukuman atas keberhasilan dan kegagalan yang terjadi, serta tidak mampu untuk menunjukkan hasil prestasi kerja yang obyektif dan terpercaya, sehingga memperoleh dukungan dari publik.

Seperti yang dikatakan oleh Yasin Setiawan², terlihat dengan jelas bahwa kondisi keterpurukan Indonesia seperti sekarang ini terjadi terutama karena kurangnya komitmen, konsistensi, profesionalitas, dan kurangnya tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, wewenang dan usaha maupun pimpinan informal masyarakat. Secara khusus dilihat dari segi administrasi negara, karena selama ini kita belum memiliki dan menerapkan sistem AKIP yang baik, secara konsisten dan berkelanjutan. Untuk mengatasi sebagian besar masalah tersebut perlu dibangun, dikembangkan, dan di implementasikan sistem AKIP dan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) secara taat asas, terpadu, dan berkelanjutan.

Dalam penelitian ini penulis menekankan dua hal yang mempengaruhi tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah tingkat profesionalisme aparat serta keefektifan sistem informasi keuangan daerah. Dalam penelitian ini setelah dilakukan analisa dan pengujian statistik dapat diketahui bahwa variabel

² Setiawan, Yasin. *Efektivitas kebijakan tentang AKIP*. Dalam www.siaksoft.net/index.php?option=com_content&task=view&id=2386&Itemid=104&limit=1&limitstart=10



tingkat profesionalisme aparat memberikan sumbangan sebesar 64,1% sedangkan variabel keefektifan sistem informasi keuangan daerah memberikan kontribusi yang lebih kecil yakni sebesar 34,4%. Dari hasil analisa tabulasi silang diketahui bahwa semakin baik tingkat profesionalisme aparat dan keefektifan sistem informasi keuangan daerah yang diterapkan akan menghasilkan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang tinggi. Adapun mayoritas jawaban yang diberikan responden untuk variabel profesionalisme aparat, sistem informasi keuangan daerah dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah termasuk dalam kategori cukup.

1. Tingkat Profesionalisme aparat

Di era otonomi daerah, pelaksanaan manajemen pemerintahan (publik) yang dibarengi dengan perimbangan keuangan yang lebih memadai kepada daerah, merupakan kebijakan publik yang memerlukan penyediaan sumber daya aparatur yang profesional. Pelaksanaan manajemen otonomi daerah belum tentu mencapai hasil yang diharapkan tanpa adanya kesiapan aparatur yang profesional untuk melaksanakan visi dan misi pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Itulah sebabnya, maka penyerahan kewenangan ke daerah akan disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan kemanfaatannya. Dalam konteks ini, profesionalisme aparatur merupakan faktor kunci. Oleh karena itu, keberhasilan manajemen otonomi daerah yang luas dan utuh memerlukan berbagai kemampuan dari para pelaksananya. Inisiatif pemerintahan daerah untuk mengupayakan tersedianya aparat yang profesional, baik dalam arti kapabilitas maupun dalam arti integritas, moralitas dan etika yang tinggi merupakan keharusan.



Profesionalisme menurut Wignjosoebroto adalah suatu paham yang mencitakan dilakukannya kegiatan-kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat, berbekalkan keahlian yang tinggi dan berdasarkan rasa keterpanggilan, serta ikrar untuk menerima panggilan tersebut dengan semangat pengabdian selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang tengah dirundung kesulitan di tengah gelapnya kehidupan.

Sejalan dengan pengertian lainnya terkait profesionalisme, menurut Legge dan Exley, profesionalisme mencakup keterampilan yang didasarkan atas pengetahuan teoritis, diperoleh dengan pendidikan tinggi dan latihan kemampuannya diakui oleh rekan sejawatnya. Semana menyatakan bahwa profesionalisme adalah Seorang pekerja yang terampil atau cakap dalam bekerja. Seseorang yang dituntut menguasai visi yang mendasari keterampilannya yang menyangkut wawasan filosofis, pertimbangan nasional, dan memiliki sikap yang positif dalam melaksanakan serta mengembangkan mutu karyanya.. Mempunyai ciri yaitu memerlukan persiapan atau pendidikan khusus, memenuhi persyaratan yang telah dibebankan oleh pihak yang berwenang, berkecakapan kerja (berkeahlian) sesuai dengan tugas khusus serta tuntutan dan jenis jabatannya. dan memiliki pendidikan yang terprogram secara relevan, sehingga terselenggara secara efektif dan efisien dan tolok ukur yang berstandar.

Effendi mengatakan bahwa profesionalisme aparatur adalah kemampuan aparatur dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di dalam organisasinya. Selain itu, masih menurut Effendi, kapasitas kemampuan profesional aparat sangat



ditentukan oleh kompetensi pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan dalam jabatan/pekerjaan.

Dengan demikian profesionalisme aparat dapat dilihat melalui pengetahuan yang dimiliki oleh aparat, keahlian yang dimiliki oleh aparat, kemampuan yang dimiliki oleh aparat serta perilaku yang ditampilkan oleh aparat. Profesionalisme berdasarkan pengetahuan yang dimiliki aparat dilihat melalui jenjang pendidikan formal yang dimiliki oleh aparat dalam membantu menyelesaikan tugas sehari-hari sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 3.1 bahwa sebanyak 72,2% responden menyatakan cukup membantu. Disamping itu profesionalisme aparat dapat dilihat melalui kesesuaian antara pendidikan aparat dengan spesifikasi pekerjaan atau jabatan yang dijalankannya sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.2 bahwa 76,4% responden menyatakan cukup sesuai. Pengetahuan aparat dalam membantu menyelesaikan tugas sehari-hari dapat mencerminkan profesionalisme aparat sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 3.3 bahwa sebanyak 69,4% responden menyatakan dengan pengetahuan yang dimilikinya cukup membantu menyelesaikan tugas.

Kemudian profesionalisme aparat dapat dilihat dari keahlian yang dimiliki oleh aparat. Keahlian yang dimiliki oleh aparat ditunjukkan melalui kemampuan dalam mengoperasikan komputer seperti pada tabel 3.4, dimana 70,8% responden mengaku cukup mampu. Dengan kemampuan operasionalisasi komputer tersebut seperti ditunjukkan pada tabel 3.5 bahwa 66,7% responden menyatakan terbantu dalam penyelesaian tugas. Terkait dengan keahlian yang dimiliki oleh aparat, dibutuhkan pelatihan guna memberikan nilai lebih bagi aparat. Sesuai pada tabel



3.6 diketahui bahwa 62,5% aparat mengikuti pelatihan antara 5-8 kali dalam setahun. Dengan pelatihan yang diikuti tentunya mendapatkan materi yang dapat diaplikasikan ketika melaksanakan tugas. Kesesuaian antara materi yang diberikan ketika pelatihan dengan tugas yang dilaksanakan dapat dilihat pada tabel 3.7 dimana 69,4% responden menyatakan cukup sesuai. Dalam meningkatkan profesionalisme dibutuhkan juga pengalaman sehingga dapat melaksanakan kinerja secara optimal. Seperti yang tertera pada tabel 3.8 bahwa 70,8% responden mengatakan berpengalaman selama 15-<22,5 tahun dalam melaksanakan tugas sejenis.

Selain dapat dilihat melalui pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh aparat, profesionalisme juga dapat dilihat melalui kemampuan yang dimiliki oleh aparat. Kemampuan aparat dalam melaksanakan tugas yang sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel 3.9 bahwa 66,7% responden menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas hampir selalu sesuai dengan SOP. Selanjutnya Profesionalisme aparat dapat dilihat dari perilaku yang dimiliki aparat. Hal ini dapat dilihat melalui tanggung jawab yang dimiliki aparat dalam menyelesaikan tugas sehari-hari seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.10 bahwa 70,8% responden menyatakan cukup memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas. Persentase penyelesaian tugas dalam waktu satu bulan oleh aparat ditunjukkan melalui tabel 3.11 dimana dalam sebulan aparat mampu menyelesaikan tugas berkisar antara 50-<75 %.



2. Keefektifan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.

Menurut Mcleod sistem diartikan sebagai: *A system is a group of element that are integrated with the common purpose of achieving objective.* Selanjutnya Burch dan Strater mendefinisikan sistem sebagai suatu sistem dapat dirumuskan sebagai setiap kumpulan bagian-bagian atau sub-sub sistem yang disatukan, yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan informasi menurut Murdick adalah terdiri dari data yang telah diambil kembali, diolah atau sebaliknya digunakan untuk tujuan informatif atau kesimpulan, argumentasi atau sebagai dasar untuk peramalan atau pengambilan keputusan. Menurut Mcleod informasi akan berguna bila memenuhi dimensi dasar atas informasi yaitu (a) relevan, (b) akurat, (c) tepat waktu serta (d) lengkap.

Menurut Anthony dan Scott sistem informasi yang efektif adalah sistem informasi organisasi yang dapat memberikan berbagai jenis informasi yang dibutuhkan oleh para pengambil keputusan yang mempunyai tingkat tanggung jawab yang berlainan; pengendalian informasi, pengendalian manajemen dan perencanaan strategis. Sedangkan menurut Davis dapat dilihat dari (1) informasi dan nilai informasi, (2) manusia sebagai pengelola informasi, dan (3) mesin atau peralatan yang dipakai dalam sistem.

Selanjutnya menurut De Lone dan Mc Lone bahwa dalam upaya untuk melihat keefektifan sistem informasi dapat dilihat melalui kualitas sistem yang ada, kualitas informasi yang disampaikan, intensitas penggunaan sistem informasi, kepuasan dari pengguna sistem informasi, *individual impact* dan *organizational impact*. Selanjutnya Weber juga mengemukakan faktor-faktor yang dapat dijadikan acuan dalam menilai keberhasilan sistem informasi tersebut, diantaranya dari kegunaan sistem yang dirasakan, kualitas informasi yang disampaikan, kemudahan di dalam penggunaan sistem informasi yang ada serta kemampuan yang dimiliki dalam menggunakan komputer.

Dengan demikian yang dipakai sebagai tolok ukur dalam penerapan sistem informasi keuangan daerah yaitu kualitas sistem informasi yang diterapkan, kualitas informasi yang disampaikan serta intensitas penggunaan dari sistem informasi tersebut. Untuk melihat kualitas sistem yang digunakan dapat dilihat dari tingkat kemudahan untuk digunakan seperti pada tabel 3.12 bahwa sebesar 70,8% responden menyatakan cukup mudah dalam mempelajari dan mengoperasikan sistem informasi yang tersedia. Terkait dengan kualitas sistem informasi yang diterapkan sesuai dengan tabel 3.13 diketahui sebanyak 68,1% responden menyatakan bahwa fasilitas sistem informasi yang ada hampir selalu menawarkan kemudahan untuk diakses. Berdasarkan tabel 3.14 bahwa sebanyak 69,4% responden menyatakan kecepatan akses sistem informasi saat digunakan adalah cukup cepat. Kemudian pada tabel 3.15 diketahui sebanyak 66,7% responden menyatakan fasilitas komputer aplikasi sistem informasi memiliki kecepatan akses >64- 100 Kbs.

Kualitas sistem informasi juga dapat dilihat dari tingkat ketahanan dari kerusakan. Pada tabel 3.16 dapat diketahui bahwa sebesar 61,1% responden menyatakan bahwa perangkat komputer aplikasi sistem informasi yang ada terbyata cukup sering terserang virus komputer. Selanjutnya pada tabel 3.17 diketahui bahwa 62,5% responden menyatakan program anti virus yang ada cukup mampu dalam menangkal serangan virus terhadap komputer.

Kualitas informasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam penerapan sistem informasi. Kualitas informasi dapat dilihat melalui keakuratan yang ada, sesuai dengan tabel 3.18 bahwa 62,5% responden mengatakan tingkat akurasi data dari sistem informasi cukup akurat. Ketepatanwaktuan informasi yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel 3.19. pada tabel tersebut, 72,2% responden menyatakan bahwa informasi yang dihasilkan cukup tepat waktu. Untuk mengetahui kualitas informasi juga dapat dilihat dari format penyajian informasi sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.21 sebanyak 62,5% responden menyatakan bahwa penyajian informasi yang ditampilkan cukup menarik. Intensitas penggunaan dari komputer aplikasi sistem informasi juga turut mempengaruhi kualitas informasi yang diterapkan. Dapat dilihat sebagaimana pada tabel 3.22 sebanyak 62,5% responden mengatakan menggunakan komputer selama 4-<6 jam dalam sehari.



3. Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban

Ini berarti bahwa akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi (penilaian) mengenai standard pelaksanaan kegiatan, apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan apabila dirasa sudah tepat, manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan standard-standard tersebut.

Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Keluaran utama dari sistem akuntabilitas kinerja adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja. Laporan ini sangat penting untuk digunakan sebagai umpan balik bagi para penyelenggara pemerintah. Laporan akuntabilitas kinerja memuat informasi yang relevan bagi para pengguna laporan tersebut yaitu para pejabat atau unsur pimpinan eksekutif pemerintah, unsur pengawasan, dan unsur perencanaan. Informasi yang dimaksud tidak hanya bersifat masa lalu (*historical*), akan tetapi juga mencakup status masa kini, dan bahkan masa mendatang.



Melalui akuntabilitas kinerja akan dapat dinilai kinerja instansi pemerintah baik jangka pendek (tahunan) maupun dalam kaitan tujuan jangka panjangnya. Dengan demikian akan tumbuh suatu kondisi dimana semua organisasi pemerintah akan merasakan kebutuhan yang mendasar akan informasi kinerja organisasinya melalui mekanisme akuntabilitas kinerja.

Tuntutan terhadap peningkatan kualitas pelayanan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja pelayanan dari instansi pemerintah mulai mendapatkan penegasan secara hukum sejak dikeluarkannya Inpres No.7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Inpres tersebut yang pada intinya berisikan sistem manajemen kinerja instansi pemerintah telah mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk menyusun suatu rencana stratejik yang berisikan rencana yang akan dijalankan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu lima tahun kedepan serta melaporkan pada setiap tahunnya hasil pelaksanaan rencana tersebut dalam suatu laporan yang disebut dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam sistem manajemen kinerja diharapkan bahwa kinerja individu dan kelompok akan diselaraskan dengan kinerja unit atau instansi sehingga diharapkan bahwa apabila tujuan organisasi/instansi tercapai maka tujuan individu dan kelompok juga akan dapat dicapai. Dari ketentuan tersebut di atas dapat



disimpulkan bahwa sistem AKIP di Indonesia setidaknya akan terdiri dari 4 fase utama yakni: (1) penyusunan rencana strategik, (2) pengukuran kinerja, (3) pelaporan kinerja, dan (4) evaluasi kinerja.

Dalam penelitian ini, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat diukur melalui Tingkat penyusunan rencana strategik, tingkat pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Dalam mengukur tingkat penyusunan rencana strategik dapat dilihat melalui tabel 3.23 sebanyak 73,6% responden menyatakan dalam penentuan visi dan misi organisasi hampir selalu melibatkan partisipasi seluruh aparat. Tabel 2.24 sebanyak 55,6% responden menyatakan bahwa seluruh aparat berperan dalam penentuan keputusan terkait dengan penetapan visi dan misi organisasi. Pada tabel 2.25 sebanyak 76,4% responden mengaku hampir selalu terlibat/berpartisipasi di dalam penentuan tujuan dan sasaran strategik. Terkait dengan siapa saja yang terlibat di dalam penentuan keputusan dalam menetapkan tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 3.26 dimana sebanyak 58,3% responden menyatakan seluruh aparat terlibat di dalamnya.

Kemudian untuk mengetahui ketrlibatan/partisipasi dalam penetapan strategi dapat dilihat pada tabel 3.27 sebanyak 72,2% responden mengaku selalu berpartisipasi dalam menetapkan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Tabel 3.28 sebanyak 65,3% menyatakan seluruh aparat dilibatkan dalam penetapan strategi organisasi. Untuk mengukur tingkat penyusunan rencana strategis juga dapat dilihat melalui ketrlibatan/partisipasi dalam perumusan indikator kinerja instansi pemerintah. Seperti pada tabel 3.29 sebanyak 62,5% responden menyatakan antara visi dan misi organisasi cukup sesuai dengan



indikator kinerja yang ditetapkan. Pada tabel 3.30 sebanyak 61,1% responden menyatakan bahwa seluruh aparat terlibat di dalam perumusan indikator kinerja organisasi.

Untuk dapat mengetahui kinerja dari suatu instansi itu mengalami kegagalan ataukah keberhasilan secara sederhana dapat dilihat dengan cara membandingkan kinerja saat ini dengan target yang telah ditetapkan. Sesuai pada tabel 3.31 sebanyak 70,8% responden menyatakan bahwa cukup sesuai perbandingan kinerja saat ini dengan target yang telah ditetapkan. Tabel 3.32 sebanyak 55,6% responden menyatakan persentase ketidaksesuaian antara kinerja aktual dengan target yang telah ditetapkan mencapai 50 - <75%. Selain dengan membandingkan kinerja dengan pencapaian target, pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual dengan kinerja tahun sebelumnya sebagaimana pada tabel 3.33 menyatakan kalau instansi ini hampir selalu membandingkan kinerja aktual dengan kinerja tahun sebelumnya. Tabel 3.34 sebanyak 65,3% responden menyatakan tingkat kegagalan kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya turun 20 - < 30%.

Laporan AKIP dimaksudkan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, bersih dan bertanggungjawab. Dengan adanya pelaporan kinerja akan memberikan informasi terkait dengan kinerja yang telah dilakukan oleh instansi tersebut. Untuk dapat mengetahui pelaporan kinerja dapat dilihat melalui intensitas pelaporan yang dilakukan dan ketepatan waktu di dalam pelaporan. Intensitas pelaporan yang terjadi dapat dilihat pada tabel 3.35 sebanyak 61,1% responden menyatakan bahwa pelaporan kinerja organisasi yang



dilakukan oleh instansi ini dalam kurun waktu satu tahun berjumlah sebanyak tiga kali dalam setahun. Kemudian pada tabel 3.36 sebanyak 63,9% responden menyatakan bahwa instansi ini cukup sering terlambat dalam penyusunan dan pelaporan kinerja instansi dalam rentang waktu satu tahun.

4. Pengaruh Tingkat Profesionalisme aparat dan Keefektifan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah antara lain disebabkan oleh profesionalisme aparat Sebagaimana yang dikemukakan oleh T. B. Silalahi, bahwa dengan adanya aparatur yang profesional dan berkarakter serta berbudaya kerja mempunyai motivasi yang tinggi dalam melayani kebutuhan masyarakat. Masih menurut Silalahi, dengan kondisi aparat yang profesional, maka baik langsung maupun tidak langsung, akan meningkatkan akuntabilitas publik, karena aparatur negara mampu menerapkan kebijakan publik yang semakin transparan dan dapat diukur tingkat kebrhasilannya

Hal yang sama dikemukakan oleh Joko Widodo menjelaskan akan pentingnya nilai profesionalisme bagi aparat: “Untuk mewujudkan administrasi negara yang bertanggungjawab dalam artian *capable to do or professionalism*, menuntut birokrat publik mempunyai kemampuan dan kecakapan teknis yang memadai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab, baik yang bersifat administratif maupun fungsional yang diberikan kepadanya.”



Berkaitan dengan upaya mewujudkan *good governance* yang salah satunya merujuk kepada nilai akuntabilitas, maka profesionalisme merupakan salah satu elemen penting di dalamnya. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan dari Bintoro Tjokroamidjodjo mengemukakan upaya ke arah *good public sector governance* yang juga merupakan upaya reformasi birokrasi, sebagai berikut:

1. Birokrasi yang netral.
2. Meningkatkan terus profesionalisme birokrasi.
3. Manajemen Kebijakan.
4. *Get rid of KKN*
5. *Material reward*
6. *Public service*, pelayanan publik
7. *Integrating factor* dari Negara Kesatuan RI bersama TNI dan Polri.³

Penjelasan di atas terlihat bahwa salah satu upaya menuju *good public sector governance* menurut Bintoro Tjokroamidjodjo adalah melalui profesionalisme birokrasi. Oleh karena itu, keberhasilan manajemen otonomi daerah yang luas dan utuh memerlukan berbagai kemampuan dari para pelaksananya. Berdasarkan pemaparan teori pada paragraf sebelumnya dapat diketahui bahwa aparat pemerintah daerah yang profesional sangat dibutuhkan dalam upaya menciptakan *good governance*.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa profesionalisme aparat memiliki hubungan yang erat dengan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Melalui analisis korelasi *product moment* diperoleh hasil korelasi antara profesionalisme aparat dengan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,258 dengan taraf signifikansi sebesar 5% atau 0.05, oleh karena hasil r analisis $>$ r tabel, $0,258 > 0,228$ sehingga diperoleh kesimpulan

³ Tjokroamidjojo (2002:111-118)



terdapat hubungan yang signifikan antara profesionalisme aparat dan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Gambaran hubungannya dapat dilihat pada tabel 3.40, dari tabel tersebut menunjukkan semakin baik profesionalisme aparat maka semakin tinggi tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, begitu juga sebaliknya semakin buruk profesionalisme aparat maka tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah semakin rendah.

Menurut Zulkifli Amsyah, dalam *e-government* terdapat pemanfaatan teknologi informasi. Informasi itu sendiri adalah data yang sudah diolah dengan cara tertentu sesuai dengan bentuk yang diperlukan. Kegiatan manajemen memerlukan dukungan informasi. Tanpa dukungan informasi, manajemen suatu organisasi tidak akan mencapai tujuan yang direncanakan apalagi untuk mencapai sasaran secara efisien dan efektif. Manajemen organisasi dalam konteks tulisan ini adalah pemerintahan daerah dan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah adalah terciptanya *good governance*.

Markus dan Keil (1994), menyatakan bahwa sebuah kesuksesan sistem akan berdampak pada individu dan organisasi penggunanya, dan pada selanjutnya dampak individual tersebut berpengaruh terhadap kinerja organisasional. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah, *e-goverment* diimplementasikan dalam sistem informasi. Penerapan Sistem Informasi pada instansi pemerintahan akan menunjang pelaksanaan Pemerintah di daerah, sehingga diharapkan adanya peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Hal ini ditegaskan melalui melalui Inpres No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*, penjelasan mengenai



penerapan *e-government* secara rinci dapat dilihat pada pasal 20, yaitu: “Penerapan jaringan informasi di lingkungan pemerintah pusat dan daerah secara terpadu telah menjadi prasyarat yang penting untuk mencapai *good governance* dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan guna antara lain memperbaiki pelayanan publik, meningkatkan efisiensi pelaksanaan otonomi daerah, serta mengurangi berbagai kemungkinan kebocoran anggaran.”

Menurut Agus Joko Purnomo, akuntabilitas efektif memiliki enam ciri. Pertama, harus utuh dan menyeluruh serta menyangkut semua aspek tugas pokok dan fungsi. Kedua, harus mencakup aspek integritas keuangan, ekonomis, efisien, efektif dan prosedural. Ketiga, akuntabilitas merupakan bagian dari sistem manajemen untuk menilai kerja individu maupun unit organisasi. Keempat, akuntabilitas harus dibangun berdasarkan sistem informasi yang handal guna menjamin keabsahan, akurasi, serta obyektifitas ketepatan waktu dalam penyampaian informasi. Kelima harus ada penilaian secara obyektif dan independen terhadap akuntabilitas suatu instansi. Dan keenam, harus ada tindak lanjut terhadap laporan penilaian atas akuntabilitas. Dari beberapa pernyataan dari Agus Joko Purnomo tersebut, pada point ketiga juga disebutkan bahwa sistem informasi yang digunakan sebagai media penerapan akuntabilitas dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi yang dalam penelitian ini merupakan kinerja instansi pemerintah. Kemudian pada *point* ke empat semakin memperjelas pentingnya nilai informasi yang handal dalam upaya penciptaan nilai akuntabilitas.



Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa mekanisme pengendalian memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kinerja pemungutan pajak hotel. Melalui analisis korelasi *product moment* diperoleh hasil korelasi antara mekanisme pengendalian dengan tingkat kinerja pemungutan pajak hotel sebesar 0,309 dengan taraf signifikansi sebesar 5% atau 0.05, oleh karena hasil r analisis $> r$ tabel, $0,309 > 0,228$ sehingga diperoleh kesimpulan terdapat hubungan yang signifikan antara sistem informasi keuangan daerah dan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Gambaran hubungannya dapat dilihat pada tabel 3.41. dari tabel tersebut menunjukkan semakin baik sistem informasi keuangan daerah maka semakin tinggi tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, begitu juga sebaliknya semakin buruk sistem informasi keuangan daerah maka tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah semakin rendah.

Hubungan antara x_1 dengan y dan x_2 dengan y merupakan hubungan yang murni, hal ini diketahui dari uji korelasi parsial dimana salah satu variabel pengaruh dikontrol untuk mengetahui murni tidaknya variabel pengaruh lainnya terhadap variabel terpengaruh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 4.1
T-Analisis dengan T-Tabel untuk Koefisien Korelasi X1 dan X2 Terhadap Y

No	Korelasi Parsial	Koefisien Korelasi	T- analisis	T-Tabel 5% (db:69)
1.	r_{y1-2}	0,153	10,8	1,96
2.	r_{y2-1}	0,232	16,91	1,96

Sumber : diolah dari data primer

Dari tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa hubungan r_{y1-2} dan r_{y2-1} dikatakan murni karena $t_{an} > t_{tabel}$ $10,8 > 1,96$ dan $16,91 > 1,96$. Angka tersebut menunjukkan bahwa profesionalisme aparat dan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh langsung terhadap tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tanpa ada variabel antara atau pengganggu.

Oleh karena dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat profesionalisme aparat dan keefektifan sistem informasi keuangan daerah terhadap tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga sebagai kelanjutan dilakukan uji statistik Analisis Regresi Ganda, diperoleh hasil $F_{reg} = 36,197$, Nilai F_{reg} tersebut dinyatakan signifikan karena nilai $F_{reg} > F_{tabel}$ ($36,197 > 2,739$). Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa tingkat profesionalisme aparat dan keefektifan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh pada tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sementara itu dari hasil pengujian statistik diperoleh hasil bahwa sumbangan variabel tingkat profesionalisme aparat dan keefektifan sistem informasi keuangan daerah terhadap tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 51,2%. Dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Sedangkan sumbangan masing-masing prediktor dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 4.2
Persentase Sumbangan X1 dan X2 Terhadap Y

No	Prediktor	Pengaruh (%)
1.	Profesionalisme aparat	64,1
2.	Keefektifan Sistem Informasi Keuangan Daerah	34,4

Sumber : diolah dari data primer

Dari tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa sumbangan variabel tingkat profesionalisme aparat terhadap variabel tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sebesar 64,1%. Sedangkan variabel keefektifan sistem informasi keuangan daerah memberikan sumbangan terhadap variabel tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 34,4%. Sedangkan untuk mengetahui tingkatan sumbangan variabel tingkat profesionalisme aparat dan variabel keefektifan sistem informasi keuangan daerah terhadap tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut digunakan pedoman yang dikemukakan oleh Kartini Kartono⁴ :

Tabel 4.3
Interpretasi Koefisien Korelasi

Koefisien Korelasi	Interpretasi
0,700 – 1,000	Tingkat pengaruh tinggi
0,440 – 0,699	Tingkat pengaruh cukup
0,200 – 0,439	Tingkat pengaruh rendah
0 – 0,199	Tingkat pengaruh sangat rendah

⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung : Alumni, 1980, hal.336.



Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pengaruh kedua variabel bebas (tingkat profesionalisme aparat dan keefektifan sistem informasi keuangan daerah) terhadap variabel terikat (tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) berada dalam interpretasi tingkat pengaruh cukup (51,2% berada dalam range antara 44%-69,9%).

Sumbangan variabel bebas pertama (64,1%) lebih besar daripada variabel bebas pertama (34,4%). Hasil penelitian ini mendukung apa yang dikemukakan oleh T. B. Silalahi, bahwa dengan adanya aparatur yang profesional dan berkarakter serta berbudaya kerja mempunyai motivasi yang tinggi dalam melayani kebutuhan masyarakat.⁵ Masih menurut Silalahi, dengan kondisi aparat yang profesional, maka baik langsung maupun tidak langsung, akan meningkatkan akuntabilitas publik, karena aparatur negara mampu menerapkan kebijakan publik yang semakin transparan dan dapat diukur tingkat kebrhasilannya.

Joko Widodo menjelaskan akan pentingnya nilai profesionalisme bagi aparat: “Untuk mewujudkan administrasi negara yang bertanggungjawab dalam artian *“capable to do or professionalism”*, menuntut birokrat publik mempunyai kemampuan dan kecakapan teknis yang memadai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab, baik yang bersifat administratif maupun fungsional yang diberikan kepadanya.”

Dengan tercapainya profesionalisme aparat dan adanya pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah maka akan terbentuk suatu bentuk

⁵ T.B. Silalahi. 1998. *Membangun sosok aparatur profesional dalam kompetisi global*. Pustaka Sinar Harapan, anggota IKAPI bekerjasama dengan Yayasan Wahana Dharma Nusa, Jakarta, hal. 57



pertanggungjawaban pemerintah dalam menyampaikan kinerja keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang dimiliki.





BAB V

PENUTUP

Setelah melakukan analisa dan interpretasi data pada bab sebelumnya, peneliti akan menyajikan kesimpulan, saran-saran serta implikasi penelitian berdasarkan hasil temuan data dilapangan. Kesimpulan ini akan menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan pada Bab I.

V.1. Kesimpulan

Dari hasil analisa dan interpretasi maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- H_0 yang diajukan dalam penelitian ini ditolak yang ditunjukkan dengan nilai $F_{reg} > F_{tabel}$ ($36,197 > 2,739$). sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara tingkat profesionalisme aparat dan keefektifan sistem informasi keuangan daerah terhadap tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- Nilai koefisien determinasi (R square) menunjukkan kemampuan variabel bebas dalam menerangkan atau menjelaskan perubahan variabel terikat. Dari hasil analisis regresi diperoleh nilai koefisien determinasi (R square) sebesar 0,512, artinya 51,2 % variabel tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dijelaskan oleh variabel tingkat profesionalisme aparat dan tingkat keefektifan sistem informasi keuangan daerah, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.
- Sumbangan variabel tingkat profesionalisme aparat terhadap tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sebesar 64,1 %.



Sedangkan untuk variabel keefektifan sistem informasi keuangan daerah adalah sebesar 34,4 %.

- Pada analisa tabulasi silang terbukti bahwa semakin baik tingkat profesionalisme aparat dan keefektifan sistem informasi keuangan daerah yang dilaksanakan maka semakin tinggi tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- Pada uji korelasi parsial diperoleh hasil bahwa ada hubungan antara variabel tingkat profesionalisme aparat dengan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, jika variabel keefektifan sistem informasi keuangan daerah dikontrol dimana semakin baik tingkat profesionalisme aparat yang ada maka semakin tinggi tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dapat dicapai. Dan untuk variabel keefektifan sistem informasi keuangan daerah, jika variabel tingkat profesionalisme aparat dikontrol juga terdapat hubungan dengan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana semakin baik keefektifan sistem informasi keuangan daerah yang diterapkan maka tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah semakin tinggi.
- Melalui pedoman yang dikemukakan oleh Kartini Kartono, maka sumbangan variabel bebas (tingkat profesionalisme aparat dan keefektifan sistem informasi keuangan daerah) terhadap variabel tergantung (tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) sebesar 51,2 % berada pada interpretasi pengaruh cukup. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat profesionalisme aparat dan keefektifan sistem informasi



keuangan daerah berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada tingkat cukup.

- Tingkat Profesionalisme aparat menjadi variabel yang memberikan sumbangan lebih besar terhadap variabel tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam hal ini profesionalisme aparat mencakup pengetahuan aparat, keahlian yang dimiliki aparat, kemampuan aparat serta perilaku yang ditunjukkan oleh aparat.

V.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diberikan, peneliti ingin memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat, beberapa saran tersebut diantaranya:

- Terkait dengan data yang dapat dilihat pada Bab II, tepatnya pada tabel 2.3 dan tabel 2.4 yang menggambarkan capaian kinerja kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dimana secara keseluruhan kegiatan yang diprogramkan memiliki ketidaksesuaian antara rencana atau target awal dengan realisasi jumlah dana yang habis terpakai untuk pembiayaan suatu kegiatan/program. Disini terlihat bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dalam tiap program/kegiatan menargetkan atau merencanakan alokasi dana yang jumlahnya sangat besar. Namun ketika dalam pelaksanaan program/kegiatan, ternyata semua item program atau kegiatan yang diagendakan dapat terlaksana semua dengan persentase capaian kinerja sebesar 100 % walaupun tanpa alokasi dana sebesar yang tertera pada kolom target alokasi dana. Artinya disini secara jelas dapat dilihat bahwa tim perencana anggaran tidak mampu melakukan



perencanaan anggaran dengan baik, sehingga target awal untuk melaksanakan kinerja kegiatan sebesar Rp. 8.853.645.246 milyar tapi hanya sejumlah Rp. 5.759.346.480 milyar saja yang digunakan. Dari hasil perhitungan selisih antara rencana dan realisasi anggaran tersebut terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3.094.298.766 milyar. Anggaran sebesar Rp. 3.094.298.766 milyar memang dikembalikan ke kas Pemerintah Kota Surabaya, tapi sekali lagi disini mengindikasikan bahwa pola perencanaan anggaran yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya belum berjalan dengan baik. (lampiran lihat pada Bab II pada Tabel 2.4, Tabel 2.5 dan Tabel 2.6). Kurang sesuai antara terget atau rencana alokasi dana dengan realisasi dana yang digunakan sehingga menyisakan anggaran berlebih karena dengan alokasi dana yang digunakan untuk pelaksanaan program/kegiatan ternyata tidak sebesar rencana awal dan dengan alokasi dana yang lebih sedikit mampu menyelesaikan seluruh program/kegiatan yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja mencapai 100 %. Artinya yang harus dilakukan perbaikan ke depannya adalah dalam hal:

1. Dalam melakukan perencanaan alokasi anggaran yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan haruslah dipikirkan dengan baik, jangan sampai setelah perencanaan selesai dilakukan ternyata pada tahap realisasi pelaksanaan kegiatan tidak dibutuhkan dana yang besar sesuai dengan yang tertera dalam perencanaan. Karena dengan kekeliruan di dalam meletakkan rencana akan



menimbulkan inefektivitas dan inefisiensi tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu, perencanaan yang dilakukan harus memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Suatu rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan
 - b. Perencanaan harus dibuat oleh orang yang benar paham mengenai tujuan organisasi
 - c. Perencanaan harus disertai dengan perincian yang teliti sehingga tidak melenceng dari tujuan yang telah ditetapkan.
 - d. Telah melakukan survei pasar sehingga dalam menentukan harga tidak jauh melenceng dari harga yang berlaku di pasar.
2. Adanya koordinasi yang baik dan kerjasama antar tiap bidang yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Terutama antara sub bidang pengelolaan penerimaan dengan sub bidang pengelolaan pembelanjaan.
- Tekait dengan tidak dimilikinya domain website tersendiri oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya yang terpisah dari pengelolaan website Pemerintah Kota Surabaya, ada baiknya apabila mulai Tahun anggaran yang baru diagendakan untuk pembuatan website mandiri yang mampu memberikan pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel baik kepada masyarakat maupun instansi lain terkait pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Sekiranya beberapa langkah yang ditempuh adalah :



1. Mengumpulkan materi/bahan terbaru terkait pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Bagian Tata Usaha, Bidang Pengelolaan Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi serta Bidang Kas dan Akuntansi untuk ditampilkan di dalam website nantinya.
 2. Bekerjasama dengan Dinas Infokom atau dengan pakar informatika dan matematika yang ada di Surabaya (bisa dari Informatika ITS, atau yang lain) untuk membantu membuat website mandiri yang mencerminkan keadaan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya sehingga masyarakat dapat mengakses informasi tersebut. Selain itu nantinya dalam pembuatan website Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya diharapkan memiliki hubungan (*link*) secara langsung dan terintegrasi dengan :
 - a. website Pemerintah Kota Surabaya
 - b. website Badan Pengawas Kota Surabaya
 - c. website Dinas Infokom
 - d. website Badan Perencanaan Kota Surabaya
- Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia adalah dengan meningkatkan kualifikasi pada proses rekrutmen. Rekrutment yang dilakukan diupayakan dengan mencari SDM yang handal di bidang akuntansi karena sangat dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam melakukan rekrutment hendaknya bekerjasama



dengan pihak swasta yang berpengalaman dan paham dalam merekrut kualifikasi pegawai seperti yang dibutuhkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Sebaiknya juga dilakukan tes psikologis terhadap para calon pegawai untuk memastikan keadaan psikologis dan kesiapan dari mereka.

- Setelah melakukan proses rekrutmen yang berkualitas, maka upaya selanjutnya yang dapat dilakukan adalah memberikan pembekalan seperti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugas yang dimiliki masing-masing. Selain itu juga dibutuhkan peningkatan perbaikan perilaku kedisiplinan dan komitmen dalam pelaksanaan tugas dengan menerapkan sistem reward and punishment sesuai dengan tingkat perilaku yang dilakukan. Tujuannya adalah akan ada peningkatan ketrampilan dan kompetensi dalam melaksanakan pekerjaan serta pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan pekerjaan yang menjadi bidang tugas masing-masing.

V.3. Implikasi Praktis dan Teoritik Terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan.

Penyelenggaraan otonomi daerah dengan menitikberatkan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan berhasil apabila didukung dengan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Pemerintahan yang baik dan efektif menuntut kesetaraan, integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi. Maka dalam penerapannya sebagai sebuah konsepsi



dalam penyelenggaraan kekuasaan dan pemerintahan menjadi sebuah tantangan tersendiri.

Konsep akuntabilitas publik didasari pemikiran bahwa rakyat tidak hanya berhak mengetahui pada pelaporan pertanggungjawaban keuangan saja, tetapi juga non-keuangan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan akuntabilitas kinerja. Dalam kaitan ini, setiap pimpinan instansi/satuan kerja pemerintah wajib melaporkan hasil kerjanya kepada atasannya yang memberi tugas dan wewenang (amanah), dan kepada publik sesuai dengan peraturan dan perundangannya yang berlaku (Inpres No 7/1999).

Akuntabilitas kinerja paling tidak memberi manfaat yang pertama masyarakat ingin mengetahui seberapa besar efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan publik oleh pemerintah, yang notabene dibiayai oleh uang rakyat. Inilah salah satu tolok ukur utama dari akuntabilitas dan transparansi. Kedua, pemerintah dapat sekaligus mengintrospeksi diri terhadap kemampuan dari setiap program yang dijalankan apakah mengarah pada tujuan pada periode akhir perencanaan.

Sayangnya konsep akuntabilitas publik masih dijalankan setengah hati untuk menjadi budaya kerja di Indonesia. Banyak pihak mengartikan akuntabilitas publik hanya terbatas pada pelaporan pertanggungjawaban keuangan saja, hanya mencakup pertanggungjawaban anggaran semata.. Akibatnya, suatu penyelenggaraan pemerintahan yang telah melaporkan alokasi dana yang digunakan dianggap sudah selesai mempertanggungjawabkan kegiatannya secara memadai terlepas dari apakah kegiatan yang dilaksanakan memberi manfaat atau



tidak, terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini pada gilirannya membuka peluang yang besar bagi praktik-praktik penyimpangan dana dan sumber daya lainnya. Yang lebih berbahaya munculnya penyimpangan gaya lama dengan pola dan modifikasi baru.

Sesungguhnya akuntabilitas publik harus diikuti oleh pengukuran secara komprehensif terhadap keluaran, hasil, dan manfaat yang benar-benar dapat dirasakan dan dilihat masyarakat, serta pada gilirannya dengan memperhitungkan dampak. Oleh karena itu, akuntabilitas kinerja pemerintahan tidak lagi terjebak dalam pola pertanggungjawaban administratif belaka. Dengan cara ini kinerja suatu instansi pemerintah pada suatu tahun tertentu dapat dibandingkan kinerjanya dengan tahun-tahun sebelumnya.

Instansi pemerintah dalam menjalankan sistem pemerintahan dan pembangunannya, memiliki kewajiban untuk paham tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban harus dilakukan secara tepat, jujur, terukur dan legitimitas, sehingga pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung baik, berdaya guna dan berhasil guna. LAKIP disajikan sebagai bentuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan kinerja instansi pemerintah berdasarkan azas Akuntabilitas. Azas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.



Sebagai implikasi praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi tenaga birokrat dalam meningkatkan kemampuannya dalam melakukan perencanaan yang baik dalam proses penganggaran sehingga dana yang direncanakan memang benar-benar mencerminkan kebutuhan yang nyata dan sesuai dengan besaran biaya/dana yang dibutuhkan untuk membiayai/mendanai setiap program/kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu diharapkan dengan adanya kajian tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat diketahui bagaimana sebaiknya setiap instansi pemerintah dalam melakukan pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan dalam setiap pelaksanaan program/kegiatan.

Sedangkan implikasi teoritis dari kajian Ilmu Administrasi Negara yaitu fokus dalam penelitian ini yakni bagaimana untuk lebih meningkatkan akuntabilitas pada instansi pemerintah dalam pelaksanaan setiap program/kegiatan dengan melihat faktor profesionalisme aparat dan penerapan sistem informasi keuangan daerah.. Terkait dengan upaya penciptaan aparat yang profesional seperti yang diungkapkan oleh oleh T. B. Silalahi, bahwa dengan adanya aparatur yang profesional dan berkarakter serta berbudaya kerja mempunyai motivasi yang tinggi dalam melayani kebutuhan masyarakat. Masih menurut Silalahi, dengan kondisi aparat yang profesional, maka baik langsung maupun tidak langsung, akan meningkatkan akuntabilitas publik, karena aparatur negara mampu menerapkan kebijakan publik yang semakin transparan dan dapat diukur tingkat keberhasilannya.

Joko Widodo menjelaskan akan pentingnya nilai profesionalisme bagi aparat: 'Untuk mewujudkan administrasi negara yang bertanggungjawab dalam



artian “*capable to do or professionalism*”, menuntut birokrat publik mempunyai kemampuan dan kecakapan teknis yang memadai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab, baik yang bersifat administratif maupun fungsional yang diberikan kepadanya.

Dengan tercapainya profesionalisme aparat dan adanya pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang efektif maka akan terbentuk suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam menyampaikan kinerja keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang dimiliki. Sumbangan variabel tingkat profesionalisme aparat terhadap tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sebesar 64,1 %, menunjukkan persentase terbesar dari variabel pengaruh lainnya.

Dalam proses penciptaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga diperlukan adanya sarana pendukung dalam penyampaian informasi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat dan setiap pihak yang membutuhkan informasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Agus Joko Purnomo, akuntabilitas efektif memiliki enam ciri. Pertama, harus utuh dan menyeluruh serta menyangkut semua aspek tugas pokok dan fungsi. Kedua, harus mencakup aspek integritas keuangan, ekonomis, efisien, efektif dan prosedural. Ketiga, akuntabilitas merupakan bagian dari sistem manajemen untuk menilai kerja individu maupun unit organisasi. Keempat, akuntabilitas harus dibangun berdasarkan sistem informasi yang handal guna menjamin keabsahan, akurasi, serta obyektifitas ketepatan waktu dalam penyampaian informasi. Kelima harus ada penilaian secara obyektif dan



independen terhadap akuntabilitas suatu instansi. Dan keenam, harus ada tindak lanjut terhadap laporan penilaian atas akuntabilitas. Dari beberapa pernyataan dari Agus Joko Purnomo tersebut, pada point ketiga juga disebutkan bahwa sistem informasi yang digunakan sebagai media penerapan akuntabilitas dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi yang dalam penelitian ini merupakan kinerja instansi pemerintah. Kemudian pada *point* ke empat semakin memperjelas pentingnya nilai informasi yang handal dalam upaya penciptaan nilai akuntabilitas.

Keterbuktian hipotesis bahwa ada pengaruh antara tingkat profesionalisme aparat dan keefektifan sistem informasi keuangan daerah terhadap tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menyumbang sebesar 51,2 % memungkinkan sisanya sebesar 48,8 % dipengaruhi oleh variabel lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Yeremias T. Keban bahwa dalam melakukan penilaian terkait dengan kinerja pemerintahan dapat dilihat melalui serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dari kinerja pemerintahan, dengan memusatkan perhatian kepada dimensi: (1) pengembangan sumberdaya manusia; (2) penguatan organisasi; dan (3) reformasi kelembagaan¹. Dalam konteks pengembangan sumberdaya manusia, perhatian diberikan kepada pengadaan atau penyediaan personel yang profesional dan teknis. Kegiatan yang dilakukan antara lain training, pemberian gaji/upah,

¹ Yeremias T. Keban "Good Governance" dan "Capacity Building" sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan
http://www.ipcos.or.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=42 diakses tanggal 18 november 2007



pengaturan kondisi dan lingkungan kerja dan sistem rekrutmen yang tepat. Dalam kaitannya dengan penguatan organisasi, pusat perhatian ditujukan kepada sistem manajemen untuk memperbaiki kinerja dari fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang ada dan pengaturan struktur mikro. Aktivitas yang harus dilakukan adalah menata sistem insentif, pemanfaatan personel yang ada, kepemimpinan, komunikasi, dan struktur manajerial. Dan berkenaan dengan reformasi kelembagaan, perlu diberi perhatian terhadap perubahan sistem dan institusi-institusi yang ada, serta pengaruh struktur makro. Dalam hal ini aktivitas yang perlu dilakukan adalah melakukan perubahan aturan main dari sistem ekonomi dan politik yang ada, perubahan kebijakan dan aturan hukum, serta reformasi sistem kelembagaan yang dapat mendorong pasar dan berkembangnya masyarakat madani.

Untuk penelitian berikutnya diharapkan akan ada kajian lebih lanjut mengenai faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti yang berkaitan dengan proses perencanaan anggaran dalam penentuan jumlah alokasi dana yang dibutuhkan bagi pelaksanaan kegiatan/program dari suatu instansi pemerintah. Karena perencanaan merupakan kegiatan pendahuluan yang harus dilakukan sebelum kegiatan utama/pokok dilaksanakan. Waterson dalam Conyers, mengatakan bahwa pada hakikatnya, perencanaan adalah usaha yang dilakukan secara sadar, terorganisasi, dan terus menerus memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada untuk mencapai tujuan tertentu.² Menurut Siagian, perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal

² Suhadak dan Nugroho, Trilaksono. 2007, *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam penyusunan APBD di era otonomi*, Malang : Bayu Media Publishing. Hal. 1



yang akan dikerjakan di masa datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.³ Dengan adanya perencanaan yang baik terkait dengan target anggaran yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan/program maka diharapkan dikemudian hari tidak akan lagi terjadi sisa lebih anggaran yang mengindikasikan kalau belum optimalnya perencanaan yang dibuat. Dengan perencanaan yang baik, maka setiap kinerja instansi akan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik pula. Selain perencanaan anggaran yang baik, faktor lain yang mungkin mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti tingkat kesejahteraan aparat/pegawai. Dengan memiliki kesejahteraan yang baik dimungkinkan perilaku aparat menjadi lebih akuntabel dalam pelaksanaan kinerja. Dengan kinerja individu yang baik maka akan turut mempengaruhi kinerja organisasi atau instansi secara keseluruhan. Dengan adanya penelitian selanjutnya tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan kajian yang lebih dalam mengenai akuntabilitas kinerja organisasi publik khususnya mengenai pengelolaan keuangan daerah..

Selain itu, diharapkan dalam penelitian selanjutnya yang memfokuskan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat lebih konsisten dalam menentukan instrumen yang akan digunakan dalam penelitian sehingga dapat memberikan hasil yang signifikan dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya terjadi pada fokus penelitian. Dalam penelitian ini terlihat ada beberapa hal yang tidak konsisten seperti pada penyusunan instrumen penelitian terkait dengan pemilihan skala penelitian yang seharusnya menggunakan skala interval semua,

³ Siagian, 1989. *Perencanaan Pembangunan (Suatu Pengantar)*, Semarang : Satya Wacana. Hal. 34



tetapi pada beberapa instrumen kuesioner terlihat beberapa point yang tidak menggunakan skala pengukuran interval. Sehingga bagi pembaca yang membaca hasil penelitian ini diharapkan dapat lebih teliti ketika menggunakan hasil penelitian in sebagai sumber referensi.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amsyah, Zulkifli. 1997, *Manajemen Sistem Informasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Davis Gordon. 1983, *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*, Pustaka Binaan Presindo, Jakarta.
- DeLone, W.H. and E.R.Mc Lean. 1992. *Information System Success: The Quest for the Dependent Variable. Information System Research 3*
- Devas, Nick, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey and Roy Kelly, 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, terjemahan dari Masri Maris, UI Press, Jakarta
- Effendi, S. 1992. *Alternatif Perencanaan Kebijakan Administrasi*. Fisipol UGM., Yogyakarta
- Ferguson. 1981, *Statistical Analysis in Psychology and Education*, : Mc Graw Hill, Tokyo
- Gie, The Liang. 1988, *Administrasi Perkantoran Modern*, Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi, Yogyakarta
- Hadi, Sutrisno. 1994, *Analisis Regresi*, Andi Offset, Yogyakarta .
- Hadi, Sutrisno. 2000, *Paket SPSS Paket Midi*, UGM Press, Yogyakarta
- Hadi, Soetrisno. 1996, *Statistik 2*, Andi Offset, 1996, Yogyakarta,
- Indrajit, Richardus Eko. 2002, *Electronic Government*, Andi press, Yogyakarta.
- Jaya Kirana, Wihana. 1999, *Analisis Potensi Keuangan Daerah, Pendekatan Makro*, : PPEB UGM, Yogyakarta.
- Kartono, Kartini. 1980, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Alumni, Bandung.

- Kumorotomo, Wahyudi., dan Erwan Agus Purwanto. 2005, *Anggaran Berbasis Kinerja: Konsep dan Aplikasinya*. Penerbit Magister Administrasi Publik UGM bekerjasama dengan ADEKSI, Yogyakarta
- LAN dan BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*". Jakarta
- Mahsun, Mohamad. SE, M.Si. Ak. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE, Yogyakarta
- Mamesah, D. J., 1995, *Sistem administrasi Keuangan daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit CV. Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo.2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit CV. Andi, Yogyakarta.
- Mariun. 1970, *Azas-Azas Ilmu Pemerintahan*, Seksi Penerbitan Fakultas Sospo UGM, Yogyakarta.
- Markus, M.Lynne, and Mark Keil. 1994. "If We Build It, They Will Come: Designing Information Systems That People Want To Use." *Sloan Management Review*
- McLeod, Raymond & Schell, George. 2001. *Management Information System*, Prentice Hall, New Jersey.
- Moekijat. 1991. *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Munandar. 1986. *Budgeting, Perencanaan Kerja, Pengoordinasian Kerja Pengawasan Kerja*. BPFE, Yogyakarta.
- Munir, H. Dasril., Arys Djuanda, Henry. dan Nogi S. Tangkilisan, Hessel. 2004, *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*, : Penerbit YPAPI, Yogyakarta
- Murdick, Robert. G. 1986, *Sistem Informasi Untuk Manajemen*, Erlangga, Jakarta.
- Nainggolan. 1987, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, Depdagri, Jakarta.
- Nazir, M. 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia, Jakarta.
- O'Brien, James. 1999, *Managing Information System: Managing Information Teknologi in the Internetworked Enterprise*, The McGraw Hill, New York.

- Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Lembaga Administrasi Negara (LAN). Jakarta. 2003.
- Purwadarminta, WJS. 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, : Balai Pustaka , Jakarta.
- Risnunu dan Sri Mastuti. 2003, *Panduan Praktis Mengontrol APBD*, Civil education and Budget Transparency Advocation (Ciba) dan Friedrich Ebert Stiftung (FES)
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance " Kepemerintahan yang baik " : Membenagun Sistem manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas menuju Good Governance.*, bagian kedua, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Siagian, P. Sondang. 1982, *Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan*, Gunung Agung, Jakarta
- Siagian, P. Sondang. 1989. *Perencanaan Pembangunan (Suatu Pengantar)*, Satya Wacana, Semarang
- Silalahi, T.B. 1998, *Membangun sosok aparatur profesional dalam kompetisi global*. : Pustaka Sinar Harapan, anggota IKAPI bekerjasama dengan Yayasan Wahana Dharma Nusa, Jakarta
- Singarimbun, Masri. 1989, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Stoner, James A.F. 1994, *Manajemen II*, Erlangga, Jakarta.
- Sugiyono. 2006, *Metode Penelitian Administrasi*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Suhadak dan Nugroho, Trilaksono. 2007, *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam penyusunan APBD di era otonomi* , : Bayu Media Publishing, Malang.
- Suparmoko, M.. 1979, *Azas-azas ilmu Keuangan Negara*, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Suparmoko. 2000. *Keuangan Negara: Dalam Teori dan Praktik.*, BPFE, Yogyakarta
- Syamsi, Ibnu. 1994, *Pokok-pokok Kebijakan Perencanaan , Pemrograman, dan penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*, Penerbit Rajawali, Jakarta

- Tim Studi Pengembangan SAKIP. *Modul Pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja dalam Konstelasi Peraturan Perundangan Manajemen Sektor Publik*. Jakarta. 2005
- Tjokroamidjodjo, Bintoro. 2002, *Good Governance: Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. : LAN RI, Jakarta.
- Tjokroamidjodjo, Bintoro, . 1987, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta..
- Weber, Ron. 1999, *Information System Control and Audit*, : Prentice Hall, New Jersey
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance, Telaah dari dimensi : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada era Desentralisasi dan OTODA*, : Insan Cendikia, Surabaya..
- Widodo, Joko. 2005, *Membangun Birokrasi berbasis kinerja*, Bayu Media, Malang.



INTERNET

- AKIP, BPKP 2003. <http://www.bpkp.go.id/> diakses tanggal 19 Februari 2007
Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia.
<http://www.depkominfo.go.id/> diakses tanggal 23 Juli 2007
- Budi Harjono. *E-government: antara konsep, tantangan dan harapan.*
<http://gerbang.jabar.go.id/>; diakses pada tanggal 20 november 2007
- Budi Harjono, *Membangun e-government*, <http://www.cert.or.id/>; diakses tanggal 20 Januari 2006
- BPKP temukan kerugian Negara Rp. 9,8 trilyun.* <http://kormonev.menpan.go.id/>;
diakses tanggal 27 Juni 2007
- Deddy Mulyadi, M.Si. , *Profesionalisme Aparatur di Era Otda*
<http://www.pikiran-rakyat.com/> diakses tanggal 20 November 2007
- E-government mendukung terciptanya good governance dan clean governance*
<http://www.kotajambi.go.id/> diakses tanggal 22 Nonember 2007
- Ekonomi Makro. APBN Berbasis Kinerja Sulit*
Dicapai. <http://www.mediaindo.co.id/> diakses tanggal 25 Juni 2007
- Evolusi Historis dari Profesi.* <http://www.ipai.info/profesionalisme.htm>, Diakses tanggal 20 November 2007
- Guna Mendorong Terwujudnya Good Governance, Aparatur Pemerintah Harus Pahami Enam Konsep Dasarnya* Rabu, 23 Maret 2005 <http://www.d-infokom-jatim.go.id/>.diakses tanggal 25 november 2007
- Kecenderungan Korupsi: Eksekutif posisi teratas*, <http://>; diakses tanggal 19 Februari 2007
- Kondisi Pendayagunaan Aparatur Negara saat ini.* <http://www.menpan.go.id/> ,
diakses tanggal 9 Desember 2007
- Laporan Keuangan Daerah harus akuntabel.* Kamis, <http://www.d-infokom-jatim.go.id/>
- Laudon, Kenneth C., and Jane P. Laudon, 2000. "Organization and Technology in The Networked Enterprise" *Management Information System*, Six Edition, International Edition. www.prenhall.com/laudon

- Membangun sistem penganggaran daerah yang transparan dan akuntabel.* <http://www.goodgovernance.or.id/> diakses tanggal 29 Agustus 2006
- Peranan Teknologi Informasi dalam Pembangunan.
<http://www.sumutprov.go.id/>; Diakses tanggal 20 november 2007
- Peraturan Anti Korupsi* <http://www.pemantauperadilan.com> : diakses pada tanggal 7 Agustus 2007
- Perkembangan Penyelesaian Kerugian Negara tahun anggaran 2005 dan 2006 oleh BPK, bagian lima <http://www.bpk.go.id/>.diakses tanggal 27 Juni 2007
- Profesionalisme aparatur pemerintah*, <http://skripsihukum.com>; diakses tanggal 9 desember 2007
- Purwanto, Direktorat Anggaran I. 2006. *Performance Based Budgeting*, slide power point pada Diskusi intern DJAOK, 23 Agustus 2006
<http://www.djapk.depkeu.go.id/> diakses tanggal 20 November 2007
- Revitalisasi E-government pada Depdagri dan Pemda*,
<http://novalfabz.blogspot.com>; diakses tanggal 20 november 2007
- Setiawan, Yasin. *Efektifitas kebijakan tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, dalam jurnal berdaya Vol II, No 11 November 2004 Hal 39.
<http://www.siaksoft.net/> diakses tanggal 13 Juli 2007
- Yasin Stiawan, *Efektivitas kebijakan tentang AKIP* www.siaksoft.net/
- Yeremias T. Keban "*Good Governance*" dan "*Capacity Building*" sebagai *Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan* <http://www.ipcos.or.id> ;diakses tanggal 18 november 2007

JURNAL, MAKALAH DAN MAJALAH

- Soelendro, Ari. 2000, *Paradigma Baru Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*. Makalah, Kongres Nasional Akuntan Indonesia IV. Jakarta.
- Yunus, Hadori. 2000, *Paradigma Baru Akuntansi Sektor Publik*. Makalah, Kongres Nasional Akuntan Indonesia IV. Jakarta.
- Dhanie Saraswati, *Good Governance : Memahami konsep Akuntabilitas.*, Jurnal Ilmiah Administrasi Poublik Vol. VII No. 2 / Maret – Agustus 2007. Hal. 574 - 589
- Ronny Kusuma Muntoro, DR, MBA, *Pentingnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Majalah Usahawan No. 12 Tahun XXXV, Desember 2006. Hal. 25 - 28
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 1999. *Profesi, Profesionalisme dan Etika Profesi*. Materi kuliah Teori Administrasi pada Program Magister Ilmu Administrasi, Program Pasca Sarjana, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

SURAT KABAR

- APBN Berbasis Kinerja sebatas teori*, Media Indonesia. Jakarta. 07 Juni 2005
- Juga minim, serapan APBD Pemprov Jatim, tengah tahun baru 27%*, Jawa Pos, Sabtu 8 september 2007
- APBD Surahaya baru terserap 32%, pejabat Pemkot takut kena jerat hukum*, Koran Jawa Pos, “ Minggu 9 september 2007